



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR:050 / 351 / Dinsos KB PP**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017 KEPALA DINAS SOSIAL,  
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah:
- b. Bahwa guna melaksanakan Peraturan Bupati Pemalang Nomer 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah:
6. Peraturan Pemerintah Pemalang Nomor 12 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang.

### Memutuskan

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan kinerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).
- KEDUA** : Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Pemalang.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang

Padatanggal : Januari 2017

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PEMALANG



**Drs. SLAMET MASDUKI, MH.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641003 199303 1 006

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pemalang  
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pemalang  
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pemalang  
4. Sdr. Kepala Bag. Organisasi Setda Kab. Pemalang

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR : 050/351 /Dinsos KB PP  
TANGGAL : Januari 2017**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021 KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Tahun-1 (2016)	Tahun-2 (2017)	Tahun-3 (2018)	Tahun-4 (2019)	Tahun-5 (2020)	Tahun+1 (2021)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani			%	13,03	18,75	24,46	30,17	35,89	41,60	47,32	IKU DAERAH
			<b>Meningkatnya penanganan pemberian jaminan social bagi PMKS</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial</b>	%	<b>12,96</b>	<b>14,37</b>	<b>15,95</b>	<b>17,71</b>	<b>19,66</b>	<b>21,82</b>	<b>24,27</b>	<b>IKU DINSOS KBPP</b>
2	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Nilai	84,46	84,53	84,63	84,87	85,21	85,55	85,89	IKU DAERAH
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Nilai	68,73	68,87	69,33	69,79	70,25	70,71	71,17	IKU DAERAH
			<b>Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik</b>	<b>Rasio KDRT</b>	<b>Angka</b>	<b>0,01</b>	<b>0,009</b>	<b>0,008</b>	<b>0,007</b>	<b>0,006</b>	<b>0,005</b>	<b>0,004</b>	<b>IKU DINSOS KBPP</b>

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Tahun-1 (2016)	Tahun-2 (2017)	Tahun-3 (2018)	Tahun-4 (2019)	Tahun-5 (2020)	Tahun+1 (2021)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Total Fertility Rate (TFR)			Nilai	2,49 (2014)	2,55	2,54	2,53	2,52	2,51	2,50	IKU DAERAH
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Cakupan peserta KB Aktif	%	79,54	81,51	81,53	81,55	81,57	81,59	81,61	IKU DINSOS KBPP

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG

**Drs. SLAMET MASDUKI, MH.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641003 199303 1 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS SOSIAL KBPP KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2016-2021**

- URUSAN : Sosial, PPKB dan PPPA
- PEMERINTAHAN  
YANG DILAKSANAKAN  
TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
- FUNGSI : a. Perumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitas Sosial serta Penanganan Fakir Miskin ;  
b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemberdayaan Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;  
d. Pelaksanaan, Pembinaan administrasi dan Kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas ; dan  
e. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya.

<b>TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN</b> <i>(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)</i>
(1)	(2)	(3)
<b>1. Meningkatkan penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS</b>	<b>Persentase PMKS yang tertangani</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan :</b> Untuk mengetahui jumlah PMKS yang tertangani di Kab.Pemalang</li> <li>• <b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah PMKS yg ditangani dibagi jumlah seluruh PMKS x 100%</li> <li>• <b>Jenis Data :</b> Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DinsosKBPPKab.Pemalang</li> <li>• <b>Penanggung Jawab :</b> KepalaDinsos KBPP</li> </ul>
Meningkatnya penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan :</b> Untuk mengetahui PMKS yang mendapatkan bantuan</li> <li>• <b>Formulasi Perhitungan :</b> jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan dibagi Jumlah PMKS yang menjadi kewenangan x 100%</li> </ul>

<b>TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN</b> <i>(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)</i>
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jenis Data :</b> Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinsos KBPP Kab. Pematang</li> <li>• <b>PenanggungJawab :</b> Kepala Dinsos KBPP</li> </ul>
<p><b>2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik</b></p>	<p><b>1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengukur kesenjangan gender pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, mengingat IPG Kab. Pematang masih perlu ditingkatkan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> IPG diukur dengan cara membandingkan Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Rata-rata pendapatan antara Laki-laki dan Perempuan</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinsos KBPP Kab.Pematang</li> </ul>
	<p><b>2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengukur keberdayaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan sumbangan pendapatan, mengingat IDG Kab. Pematang masih perlu ditingkatkan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Menjumlahkan Indeks Keterwakilan perempuan dalam Parlemen, Indeks Pengambilan Keputusan dan Indeks Distribusi Pendapatan dibagi tiga</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinsos KBPP Kab. Pematang.</li> </ul>
<p>Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik</p>	<p>Rasio KDRT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini dipilih karena merupakan indikator penting guna meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.</li> </ul>

<b>TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> Jumlah KDRT _____ X100% Jumlah rumah tangga</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Non Kumulatif.</li> <li>• <b>Sumber Data:</b> Dinsos KBPP Kab.Pemalang</li> </ul>
<b>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB</b>	<b>Total Fertility Rate (TFR)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengukur Angka kelahiran total, mengingat TFR di Kabupaten Pemalang masih tinggi dan masih perlu untuk diturunkan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> TFR diukur dengan cara menghitung angka kelahiran hidup selama masa reproduksi seorang wanita</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinsos KBPP Kab.Pemalang</li> </ul>
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Cakupan peserta KB Aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Pemalang</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah peserta KB dikalikan 100%</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Sosial Kab.Pemalang.</li> </ul>

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PEMALANG

  
**Drs. SLAMET MASDUKI, MH**  
 Kepala Dinas  
 NIP. 19641003 199303 1 006